

Orientasi Kebijakan Reformasi dalam Rangka Menentukan Sikap Kepemimpinan Bangsa Pasca Pemilu 2004

Chairul Saleh

One of the problem according to perspective of civility humanity is May, 1998 trgedy that denotes the beginning of reformation in Indonesia. Many reformation reformulations that all of aspect that start to conduct. Actually, one of reformation goal is reforming sustainable development. According to the author of this article, the policy of reformation of development including to overcome the crisis of economics that becoming a short run policy and the realization of rreformation itself that constitutes a long run policy. Actually, Indonesian needs a national leader (a president or a vice president) who has acceptability, capability and competency.

Selasa pagi, 10 November 1998, Ketua SDPR/MPR telah membuka Sidang Istimewa MPR dengan nada suara yang penuh keyakinan dikatakan bahwa SI yang akan berlangsung hingga 13 Nopember ini merupakan peristiwa penting karena akan menentukan kehidupan bangsa ini di masa mendatang. Padahal di luar gedung MPR, dan kota-kota lain, berbagai kelompok masyarakat terutama mahasiswa sedang bersiap-siap menggelar demonstrasi. Yang mereka lakukan itu disebut juga "Sidang Rakyat". Pemerintah juga sudah siap menghadapi para demonstran itu. Bahkan pemerintah (KSAD dan Kapolri membantu) juga menyiapkan pasukan keamanan masyarakat swakarsa (Pamswakarsa) yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang sanggup mengamankan SI MPR. Di TV nampak "pasukan" itu membawa bambu runcing. Seperti zaman revolusi saja. Kalau dahulu yang dihadapi adalah tentara Jepang, Belanda dan Sekutu, sekarang justru mahasiswa yang sedang memperjuangkan

reformasi. Dalam pidatonya Amien Rais memberikan komentar bahwa sebaiknya pasukan swasta yang didatangkan dari berbagai daerah itu ditarik saja. Selain resiko bentroknya dengan para demonstran besar, orang bertanya-tanya, mengapa ABRI mengambil jalan (paling tidak membiarkan) berbahaya itu.

Tiga bulan sebelumnya 13 – 15 Mei 1998 Indonesia dilanda kerusuhan massa yang meremukredamkan keberadaban manusia di Bumi Pancasila. Pembakaran, penjarahan, pemerkosaan dan serbaneka varian tindak kekerasan apapun, adalah kandungan kerusuhan massa yang sungguh terasa amat sangat panjang keberlangsungannya untuk sebuah ibu kota negara yang sebenarnya memiliki aparat keamanan tangguh di hadapan hamparan rakyatnya sendiri.¹

¹ Limas Sutanto, *Mengingat Tragedi Mei*, Kompas, Sabtu 10 Mei 2003.

Inilah persoalan mendasar pada perspektif keberadaban kemanusiaan, yang menjadikan tragedi Mei 1998 tidak layak untuk dilupakan begitu saja. Segala peristiwa yang terjadi pada bulan Mei merupakan langkah awal menuju reformasi yang ingin disampaikan oleh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Berbagai rumusan reformasi di segala bidang perlahan mulai dijalankan, salah satunya adalah tujuan untuk mencapai reformasi pembangunan yang berkesinambungan.²

Visi Reformasi dan Kedaulatan Rakyat

Rumusan tujuan reformasi pembangunan menggambarkan visi MPR mengenai reformasi total. Visi itu menggambarkan bahwa skala prioritas dari tujuan akhirnya adalah menciptakan stabilitas moneter sebagai prasyarat pemulihan aktivitas usaha nasional. Prioritas kedua baru mewujudkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, tujuan ekonomi lebih didahulukan dari tujuan politik. Menegakkan kedaulatan hukum dan hak-hak asasi manusia agaknya merupakan agenda jangka panjang. Tetapi, rumusan reformasi sosial budaya tidak jelas. Sebenarnya, disebut juga kalimat "terciptanya ketertiban dan perbaikan sikap mental" namun hal itu disebut dalam kaitannya dengan penegakkan kedaulatan hukum, yang lebih merupakan aspek sosial budaya itu. Sementara itu di bagian sosial budaya hanya disebut tujuan mewujudkan "masyarakat madani" atau *civil society*, seolah-olah masyarakat madani itu hanya mencakup aspek sosial budaya.

Kebijaksanaan reformasi pembangunan mencakup dua hal. Pertama, adalah tentang penanggulangan ekonomi, yang merupakan kebijaksanaan jangka pendek. Kedua, pelaksanaan reformasi itu sendiri yang

merupakan kebijaksanaan jangka panjang, tetapi harus dilaksanakan sekarang juga karena merupakan upaya – upaya pendukung penanggulangan krisis ekonomi.

Perspektif Kepemimpinan ke Arah Reformasi

Cara pandang yang dominan dalam melihat konfigurasi perpolitikan Orde Baru dewasa ini adalah adanya sifat korporatif dari kekuatan-kekuatan politik yang menopang sistem politik kita. Pemikiran yang mendasari cara pandang sedemikian itu tidak dapat dilepaskan dalam konteks kesejarahan dari perkembangan kehidupan perpolitikan yang traumatis pada masa pra-Orde Baru. Hal tersebut dapat juga disebutkan secara sederhana bahwa politik sebagai panglima, sebagai antitesis dari cara pandang dominan ekonomi sebagai panglima.

Konsekuensi dari cara pandang tersebut menjadikan masalah-masalah yang berbau politik menjadi tidak atau kurang populer, termasuk diantaranya adalah istilah partai politik. Sampai sekarang, salah satu kekuasaan politik yang cukup besar tidak mau atau tidak suka mengakui sebagai partai politik, meskipun memiliki fungsi – fungsi sebagaimana layaknya partai politik. Hal semacam ini memang tampak aneh, tetapi kenyataan yang ada membuktikan betapa trauma masa lalu tersebut masih saja dan membayangi cara berfikir dan cara pandang, sehingga upaya-upaya terobosan ke arah pembaharuan kehidupan perpolitikan kita terasa sangat lamban, untuk tidak mengatakan mengalami kemandegan.

Untuk mencermati fenomena sebagaimana konstelasi di atas, ada baiknya ditelaah bersama beberapa isu strategis

² *Ibid*

yang sebaiknya menjadi agenda kita bersama dalam rangka reformasi politik ke arah Pasca Orde Baru. Isu strategis tersebut menyangkut antara lain: (1) sistem dan kehidupan kepartaian; (2) lembaga-lembaga kemasyarakatan; (3) lembaga-lembaga legislatif; (4) dan penyelenggaraan pemilihan umum. Rambu-rambu yang membatasi pembahasan adalah bingkai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama.

Tulisan Sayidiman Suryohadiprojo (1990) mengenai pentingnya membangun dan menata kehidupan politik yang sehat terasa menggugah. Terlebih lagi imbauannya kepada kalangan generasi muda untuk memilih arena politik sebagai pilihan aktualisasi peran yang ingin dimainkannya. Tulisan ini ingin menanggapi sekaligus mengajak berpikir lebih jauh dan mengupayakan kemungkinan terwujudnya tatanan kehidupan politik yang sehat tersebut.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara yang pernah terlepas dari cengkeraman penguasa otoriter, Indonesia tidak dapat memanfaatkan moment strategis untuk melakukan reformasi total atas UUD 1945. Misalnya Filipina, ketika *people power* berhasil menggulingkan Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino menjadi Presiden, langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk Komisi Konstitusi (Constitutional Commission).³

Reformasi dari Berbagai Pengalaman Pemimpin Bangsa

Selain itu pernyataan tegas juga disampaikan oleh Zhu Rongji yang di tulis di harian *Kompas* 25 Mei 2003 dalam jumpa pers pertamanya 22 Maret 1998, begitu terpilih sebagai Perdana Menteri Republik Rakyat China. " Saya tidak peduli terhadap kesulitan apa pun yang dihadapi. Saya akan

bekerja sepenuhnya serta mencurahkan seluruh kemampuan untuk bangsa dan negara hingga hari akhir dari kehidupan saya...". Zhu kemudian memesan 100 peti mati, satu diantaranya untuk dia sendiri dan 99 lainnya diperuntukkan bagi pejabat pemerintah yang terbukti korupsi. Dua tahun kemudian, yakni 8 Maret 2002, Zhu membuktikan kata-katanya. Hari itu, Pengadilan Beijing menjatuhkan hukuman mati bagi Hu Changqing, mantan wakil gubernur provinsi Jiangxi, karena terbukti menerima suap sebesar 660.000 dollar AS dari pengusaha. Hu adalah salah satu pejabat tinggi dari sekian banyak pelaku korupsi yang dihukum di RRC selama periode PM Zhu. Pemberantasan korupsi di RRC yang dilakukan secara sistematis piramida merupakan bagian dari reformasi negeri Tirai Bambu sejak dilontarkan tokoh karismatik China Modern, Deng Xiaoping. Penegakkan supremasi hukum itu juga didukung penuh oleh Presiden RRC saat itu, Jiang Zemin, Jiang berkali-kali menekankan hukuman mati terhadap Hu Changqing agar dilihat sebagai peringatan bahwa pemerintah serius memerangi korupsi.

Apa yang terjadi setelah pemberantasan korupsi itu dilakukan secara tegas. Kepastian hukum yang mendukung kepastian usaha menjadi jelas. Negeri itu kemudian menjadi tujuan investasi teraman didunia yang mampu menghimpun dana masuk 50 milyar dollar AS setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, RRC juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, rata-rata diatas 7 % per tahun.⁴

³ Saldi Isra, *Saatnya Membentuk Komisi Konstitusi*, Kompas, 5 Januari 2001.

⁴ Anonim, *Reformasi Tanpa Cetak Biru*, Kompas 25 Mei 2003.

Banyak sekali pelajaran yang bisa ditarik dari pengalaman RRC ini. Diantaranya adalah reformasi yang dijalankan dilakukan secara bertahap, terencana, sistematis, dan memiliki arah yang jelas. Saat skenario reformasi itu diimplementasikan, sutradaranya konsisten, bersatu, memiliki visi yang jelas, tegas, dan berani mengambil resiko. Sebenarnya ada contoh negara yang menjalankan reformasi secara lancar (*smooth*) dan tidak seradikal RRC, yakni Afrika Selatan. Padahal, negeri ini memiliki persoalan yang lebih kompleks karena terjadi dominasi minoritas kulit putih terhadap kulit hitam. Reformasi disana jauh lebih *smooth* karena jauh sebelumnya sudah disiapkan rencana jangka panjangnya yang menjadi pedoman perubahan politik di negeri ini yang dibuat oleh orang-orang ahli, termasuk Arend Lijphart, guru besar Ilmu Politik asal Belanda dari University of California, San Diego, Amerika Serikat.

Seorang penulis asing di *Far Eastern Economics Review*⁵ mengatakan, pemerintahan di zaman reformasi adalah persis Orde Baru, tetapi tanpa visi. Ia mencontohkan, dahulu korupsi itu disebut sebagai satu penyakit yang melembaga dan membudaya, tetapi sekarang menjadi *way of life*. Sementara dari sisi demokrasi politik, setelah lima tahun reformasi, hasilnya mengejutkan sebab pemerintahan demokrasi bukannya stabil, tetapi labil. Indikatornya bisa dilihat dari jatuh bangunnya pemerintahan, hanya dalam waktu 4–5 tahun, sudah tiga presiden. Yang terjadi akhirnya aneka improvisasi politik yang sifatnya *trial and error*. Multi partai yang sedang dilakukan ternyata bermasalah. Partai muncul banyak sekali sehingga tidak ada partai yang dominan. Akhirnya, koalisi-koalisi diperlukan dan kompromi dilakukan untuk kepentingan mereka dan bukan kepentingan rakyat. Perkembangan jual beli

dukunga merupakan pukulan dalam politik ini. Politisi saling pukul, saling sikat, saling kompromi untuk keperluan jangka pendek kepentingan masing-masing. Hal ini yang menyebabkan hasil-hasil dalam lima tahun reformasi sangat mengecewakan.

Otonomi daerah juga dilakukan secara radikal. Meskipun bagus secara konseptual, namun menimbulkan berbagai pergolakan di daerah karena terlalu cepat pelimpahan wewenang ke daerah. Akibatnya, muncullah pajak/retribusi secara membabi buta, efek langsungnya tidak menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Rakyat diperas melalui berbagai pungutan dengan dalih otonomi daerah, bukannya disejahterakan seperti tujuan otonomi itu sendiri. Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno mencatat lebih dari 1.400 peraturan daerah yang melanggar konstitusi. Kepala daerah yang sangat bersemangat sampai hampir-hampir kalap dalam memajaki warganya. Ada pajak burung perkutut, pajak kucing, pajak anjing dan pajak kematian, seperti tidak ada kendali. Dari pengalaman awal otonomi daerah ini, lagi-lagi tidak adanya struktur mental para pejabat yang etis dan bertanggung jawab.⁶

Secara umum kalau dibuat *balance sheet* atau neraca umum plus minus reformasi, maka yang diperoleh rakyat Indonesia adalah terbukanya gerbang menuju kehidupan yang lebih demokratis. Dari enam agenda, diakui Amien Rais, baru empat diselesaikan walau belum sempurna. Yang pertama Amandemen UUD 1945, kedua penghapusan Dwi Fungsi ABRI lebih cepat dari rencana sebelumnya. Pada tahun

⁵ Neta S Pane, *Mungkinkah Islah dengan Koruptor Orde Baru*, Kompas, Kamis, 1 November 2001.

⁶ Anonimus, *Reformasi Tanpa Cetak Biru*, Kompas 25 Mei 2003.

2004 ini tidak ada kursi gratis sebab semua anggota DPR dan DPD dipilih rakyat. Otonomi daerah yang sudah diimplementasikan pada 1 Januari 2001 merupakan loncatan reformasi yang sangat jauh. Malah, Christianto Wibisono mengatakan, otonomi daerah seperti ini kakeknya federalisme. Agenda reformasi keempat dan cukup dramatis adalah, orang Indonesia menikmati kebebasan demokratis yang bersifat multi-dimensional. Kebebasan pers, demonstrasi, berserikat, berkumpul, membuat partai politik, serta tidak ada tahanan politik dari ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Hal ini dicatat dengan tinta emas dalam sejarah. Memang dua agenda reformasi belum tercapai, yakni menegakkan pemerintahan yang bersih melawan KKN dan menegakkan supremasi hukum. Malah, dua agenda ini gejalanya lebih parah dari zaman Soeharto.⁷

Entah apa dosa yang dilakukan bangsa ini. Di zaman reformasi malah menghasilkan politik uang (*money politic*) yang luar biasa dahsyatnya. Rasa nasionalisme dan patriotisme sudah seperti sangat pudar. Itu yang menimbulkan pertanyaan mendasar, *what's really going on* di dalam bangsa ini. Permainan korupsi makin marak, pemain dan bajunya ganti, tetapi permainannya jauh lebih gawat.

Akan tetapi citra reformasi di benak banyak orang tidak positif sekalipun banyak yang dipanen. Kalau menyangkut perut rakyat, reformasi tidak bisa berbuat banyak. Angka pengangguran membengkak, pemulihan ekonomi terhuyung-huyung, supremasi hukum hanya dalam teori karena hukum selalu diskriminatif dalam pelaksanaannya. Yang kuat dan dekat dengan kekuasaan selalu menang, sementara rakyat kecil tidak pernah menang.

Kalau negara ini mau diperbaiki, harus dimulai dari pemimpinnya. Pemimpin harus memiliki visi, komitmen, dan *risk taker*,

berani ambil resiko untuk dilawan barisan kaum korup serta resiko dilawan premanisme dan para *mafioso*. "Memang itu konsekuensi kalau kita ingin memperbaiki bangsa yang parah ini," ujar Amien Rais.⁸

Kepemimpinan Nasional Berbasis Sistem Kebutuhan Indonesia

Pada dasarnya, kita cukup membutuhkan sosok pimpinan nasional yang akseptabel dan kapabel atau kompeten.. Kriteria akseptabilitas dan kapabilitas sekaligus inilah yang dalam konteks kekinian menjadi tantangan berat bagi bangsa Indonesia untuk memilih seorang sosok pemimpin nasional. Alternatifnya kedua sosok pemimpin (Presiden dan Wakil Preseiden) sebagai pasangan bekerja sama secara sinergis menjadi satu kesatuan untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia. Misalnya, sosok presiden yang dipilih lebih karena integritas dan nilai – nilai moral yang dapat diterima (*politically acceptable*), sedangkan wakil presiden dipilih lebih karena kapasitas dan kompetensinya (*professionally capable*). Tampaknya dari perspektif manajemen, hal ini sulit terlaksana. Pasalnya untuk dapat bersinergi positif, kedua sosok pemimpin ini harus bekerjasama dalam kerangka tim (*Team Work*) yang solid, dimana prasyarat utamanya adalah Mutual Trust.

Pertanyaannya, mungkinkah *trust* terbentuk bila dua sosok pemimpin nasional berasal dari partai politik berbeda? Sudah siapkah para elit politik kita mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan golongan atau partai?

⁷ Anonimus, *Reformasi Tanpa Cetak Biru*, Kompas 25 Mei 2003.

⁸ Limas Sutanto, *Mengingat Tragedi Mei*, Kompas, Sabtu 10 Mei 2003.

Alternatif lanjutannya, bolehlah bila salah satu dari pasangan ini adalah profesional nonpartisan. Pertanyaannya mungkinkah ini tercipta dalam sistem demokrasi politik masa kini? Memang semuanya serba sulit, namun kita tidak bisa terus bermimpi.

Pendekatan praktisnya, kita perlu memilih prioritas. Apakah dalam konteks kepemimpinan nasional yang utama adalah penampilan falsafah kepemimpinan atau kompetensi manajemen? Kita semua sadar, tantangan yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia adalah menemukan terobosan – terobosan pragmatis agar kita lepas dari krisis multidimensi.⁹

Bila saja para pimpinan lembaga pemerintah alias menteri memberi prioritas untuk duduk bersama pelaku ekonomi (KADIN) dan masyarakat lain dalam semangat saling percaya dan bersinergi, *road map* industrialisasi di semua sektor dapat tercipta dan fundamental ekonomi makro yang sudah stabil akan berfungsi sebagai basis guna membangun sektor riil. Tampaknya, para pimpinan lembaga pemerintah ini tidak punya waktu untuk berfikir dan berencana secara strategis. Terlalu sibuk untuk urusan – urusan teknis atau operasional serta seremonial. Akibatnya, mereka terjerumus ke dalam pola manajemen pemadam kebakaran atau *free – fighting*.

Tidak terlalu sulit untuk mencari pimpinan lembaga yang memiliki kemampuan manajerial sebagai anggota Kabinet Presiden 2004 – 2009, bahkan tenaga profesional yang telah memiliki *track – record* dan *credible* akan bersedia bekerja sebagai relawan bilamana Presiden RI serius dan tulus untuk berbenah. Periode 2004 – 2009 kita canangkan sebagai era penyelaras, pembenahan, dan penyehatan dari proses pendarahan akibat krisis

ekonomi yang berkepanjangan.

Setelah penataan manajemen seluruh kelembagaan, khususnya dilingkungan eksekutif, berhasil barulah *domain leadership*, yaitu masa depan harus mengemuka. Dengan demikian, sosok pemimpin nasional tidak harus seorang *extraordinary leader*. Tentu saja tiga serangkai kualitas pimpinan, yaitu visioner, moralis, dan pemberani, perlu dimiliki dengan prioritas terakhir, *courage* karena tidak akan ada terobosan signifikan tanpa keberanian mengambil risiko. Namun akhirnya kepemimpinan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) harus dapat lulus dari tingkat persiapan ke tingkat sarjana, jangan sampai justru turun ke taman kanak – kanak.¹⁰

Visi Kepemimpinan Bangsa Yang Reformis

“Leader or Leadership is One of the Most Observed but the Least Understood Phenomena on Earth” demikian kata seorang pakar kepemimpinan dunia, James McGregor Burns.¹¹ Maksud pernyataan itu adalah dimana-mana kita melihat pemimpin atau kepemimpinan secara formal, tetapi fenomena pemimpin atau kepemimpinan secara substansial masih amat jarang adanya. Hasil pengamatan para pakar tentang kepemimpinan sangat menyedihkan. Mereka menyatakan bahwa orang yang duduk di kursi pemimpin belum tentu mempunyai kepemimpinan. Diantara mereka ada yang mempunyai kemampuan manajerial, tetap bukan seorang yang mempunyai kemampuan memimpin. Yang

⁹ Tanri, Abeng, *Kepemimpinan Nasional Berbasis Sistem Kebutuhan Indonesia*, Kompas, 11 Maret 2004.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Saldi Isra, *Saatnya Membentuk Komisi Konstitusi*, Kompas, 5 Januari 2001.

Orientasi Kebijakan Reformasi dalam Rangka Menentukan Sikap Kepemimpinan Bangsa Pasca Pemilu 2004

Chairul Saleh

One of the problem according to perspective of civility humanity is May, 1998 trgedy that denotes the beginning of reformation in Indonesia. Many reformation reformulations that all of aspect that start to conduct. Actually, one of reformation goal is reforming sustainable development. According to the author of this article, the policy of reformation of development including to overcome the crisis of economics that becoming a short run policy and the realization of rreformation itself that constitutes a long run policy. Actually, Indonesian needs a national leader (a president or a vice president) who has acceptability, capability and competency.

Selasa pagi, 10 November 1998, Ketua SDPR/MPR telah membuka Sidang Istimewa MPR dengan nada suara yang penuh keyakinan dikatakan bahwa SI yang akan berlangsung hingga 13 Nopember ini merupakan peristiwa penting karena akan menentukan kehidupan bangsa ini di masa mendatang. Padahal di luar gedung MPR, dan kota-kota lain, berbagai kelompok masyarakat terutama mahasiswa sedang bersiap-siap menggelar demonstrasi. Yang mereka lakukan itu disebut juga "Sidang Rakyat". Pemerintah juga sudah siap menghadapi para demonstran itu. Bahkan pemerintah (KSAD dan Kapolri membantu) juga menyiapkan pasukan keamanan masyarakat swakarsa (Pamswakarsa) yang terdiri dari berbagai kelompok masyarakat yang sanggup mengamankan SI MPR. Di TV nampak "pasukan" itu membawa bambu runcing. Seperti zaman revolusi saja. Kalau dahulu yang dihadapi adalah tentara Jepang, Belanda dan Sekutu, sekarang justru mahasiswa yang sedang memperjuangkan

reformasi. Dalam pidatonya Amien Rais memberikan komentar bahwa sebaiknya pasukan swasta yang didatangkan dari berbagai daerah itu ditarik saja. Selain resiko bentroknya dengan para demonstran besar, orang bertanya-tanya, mengapa ABRI mengambil jalan (paling tidak membiarkan) berbahaya itu.

Tiga bulan sebelumnya 13 – 15 Mei 1998 Indonesia dilanda kerusuhan massa yang meremukredamkan keberadaban manusia di Bumi Pancasila. Pembakaran, penjarahan, pemerkosaan dan serbaneka varian tindak kekerasan apapun, adalah kandungan kerusuhan massa yang sungguh terasa amat sangat panjang keberlangsungannya untuk sebuah ibu kota negara yang sebenarnya memiliki aparat keamanan tangguh di hadapan hamparan rakyatnya sendiri.¹

¹ Limas Sutanto, *Mengingat Tragedi Mei*, Kompas, Sabtu 10 Mei 2003.

lebih parah lagi, banyak diantara mereka yang duduk di kursi pemimpin, tetapi bukan manusia yang punya kemampuan memimpin dan tidak mempunyai kemampuan manajerial sama sekali.

Orang yang paling ideal menjadi pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan sekaligus. Prof Zaleznik dari Universitas Harvard mengatakan, meskipun kondisi ideal itu tidak mudah ditemukan, realitasnya senantiasa ada. Senada dengan yang di atas, para ahli psikologi kepemimpinan menegaskan, sekarang banyak organisasi yang *over managed* (diatur secara berlebihan), tetapi *underlead* (kurang dipimpin). Padahal, hari ini dan esok kita berada dalam era penuh ketidakpastian, turbulensi, dan kebingungan, karena itu, kita butuh seorang pemimpin dan berkepemimpinan. Jadi tidak cukup seorang "Manajer" saja.¹²

Dalam keadaan multikrisis yang dialami bangsa Indonesia seperti saat ini, secara umum sangat dibutuhkan tiga fungsi utama pemimpin atau kepemimpinan. Pertama, visi yang jelas dengan arah yang menatap jauh ke depan. Dengan begitu, pemimpin dapat mengkomunikasikan program dan kebijakannya kepada rakyat untuk bergerak ke masa depan yang lebih progresif. Kedua, kemampuan *aligning people* (menyatukan rakyat). Maksudnya adalah kemampuan mengikat orang-orang untuk bersatu, berjajar, serta sejajar maju bersama untuk bergerak menuju ke arah perwujudan visi yang telah digariskan. Ketiga, *inspiring and motivating*. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi "hati dan pikiran" pengikut dan semua rakyatnya. Jika seorang manajer hanya punya "pengaruh secara tidak langsung", maka seorang pemimpin harus punya "pengaruh langsung" kepada bawahan, pengikut, serta semua rakyat.¹³

Trifungsi utama pemimpin atau kepemimpinan diatas dapat kita bedakan dengan tiga fungsi utama manajer, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan, serta pengawasan. Oleh karena itu, untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari krisis dan mengangkat harkat bangsa Indonesia menuju masa yang mencerdaskan, kombinasi kompetensi kepemimpinan dan manajerial adalah sebuah hal yang ideal. Jika tidak memungkinkan, hendaknya paling tidak mempunyai jiwa dan fungsi kepemimpinan sebagaimana diuraikan dimuka.

Jika ditelusuri kembali sejarah bangsa Indonesia, akan tampak bahwa sumber utama munculnya pemimpin bangsa ini adalah kampus, organisasi keagamaan, dan bisnis. Sejak fajar abad kedua puluh (1908), dunia kampus telah melahirkan pemimpin untuk kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, "kampus" menampakkan wujudnya dalam AMS (SMA), HBS dan MULO (SLTP). Pada tempat itulah para kiai, ustad, guru, dan tokoh nasional menggodok jiwa-jiwa budak untuk bangkit melawan penjajah menuju kemerdekaan bangsa. Dengan tempaan para tokoh itu, visi, inspirasi, serta motivasi kepemimpinan dapat menghunjam pada dada para pemuda dengan mantap.

Jenderal Clausewitz, ahli strategi besar yang amat terkenal dari Jerman, mengatakan bahwa perang tidak melahirkan seorang jenius besar, tetapi melahirkan seorang pemimpin besar. Pengalaman kepemimpinan yang ditempa dalam waktu lama tentu akan membawa seseorang menjadi makin matang sebagai pemimpin. Pengalaman yang berat seperti keadaan

¹² Tarmizi Taher, *Menyoal Kepemimpinan Indonesia*, Kompas, Sabtu, 5 Juli 2003..

¹³ Ibid

perang tentu lebih banyak melahirkan sosok pemimpin jika pengkaderan kepemimpinan dikelola dengan baik. Dalam keadaan normal (bukan perang), seharusnya pengkaderan kepemimpinan hendaknya lebih diperhatikan secara serius dan profesional. Berdasarkan realitas diatas, sejarah bangsa Indonesia sampai hari ini, menunjukkan bahwa kampus adalah sumber utama pemimpin atau kepemimpinan. Sayangnya, pemerintah sering tidak bersahabat dengan kampus sehingga pengkaderan kepemimpinan bangsa tidak terprogram dengan baik. Pengalaman besar dari para aktivis kampus lebih banyak ditonjolkan sisi negatifnya. Begitu juga dengan larangan mahasiswa untuk berkiprah dan berkeaktivitas melalui kebijakan NKK/BKK yang cenderung mengebiri munculnya kader pemimpin baru.¹⁴

Pemilu dan Kepemimpinan Nasional

Salah satu celah dalam Pemilu 2004 yang memberi optimisme bagi kelompok pro-perubahan adalah adanya pemilihan presiden dan wakil presiden langsung. Model pemilihan langsung ini memungkinkan lahirnya sosok pemimpin nasional yang benar-benar memiliki legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat. Presiden dan wakil presiden sering diidentifikasi sebagai personifikasi kepemimpinan nasional meski kadang ini terlalu mensimplifikasi persoalan. Karena sebenarnya apa yang disebut kepemimpinan nasional, kompleksitasnya lebih dari sekedar presiden dan wakil presiden. Problem kepemimpinan nasional (*national leadership*) oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu persoalan mendasar yang dihadapi bangsa. Masalah kepemimpinan ini merupakan satu pangkal dari sekian akar krisis yang mendera bangsa ini

selama hampir enam tahun. Kepemimpinan nasional kini dianggap kepemimpinan yang tidak memimpin. Inilah model kepemimpinan yang memiliki derajat rendah (*low leadership*).

Dikatakan tidak memimpin karena kepemimpinan yang ada tidak memenuhi tiga hal mendasar yang harus melekat dalam kepemimpinan. Pertama visi dan strateginya untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan guna mewujudkan visi itu. Visi merupakan konseptualisasi tentang hasil yang ingin diwujudkan seorang pencipta. Kedua, berkait dengan kegiatan kepemimpinan. Kegiatan kepemimpinan adalah merapatkan barisan, yang berarti mengkomunikasikan arah baru kepada mereka yang dapat menciptakan jemaah yang memahami visi dan memiliki komitmen untuk mewujudkannya. Tidak mungkin membangun sebuah koalisi besar untuk mengikuti visi seorang pemimpin bila sang pemimpin tak mampu mengomunikasikan apa yang mereka hendak wujudkan itu. Dengan cara demikian sikap diam, menunggu, nir-inisiatif hanya akan memampetkan transformasi visi ini.

Ketiga, untuk mewujudkan visi, seorang pemimpin dituntut senantiasa memberi motivasi dan inspirasi. Pemberian motivasi dan inspirasi ini dilakukan dengan menjaga agar orang bergerak dalam arah yang benar merujuk kebutuhan, nilai, dan emosi dasar. Karena itu, seorang pemimpin harus terus meniupkan optimisme pada rakyatnya meski jalan yang akan ditempuh terjal dan menjulang. Sehingga selip ucap seperti "bingung", "pusing", "takut melanggar HAM jika memberantas korupsi", "pemerintahan keranjang sampah" tidak perlu keluar dari pernyataan seorang pemimpin.

¹⁴ Ibid

Karena kepemimpinan nasional menjadi jantung utama perubahan bangsa, maka upaya mewujudkan kepemimpinan nasional yang berkualitas menjadi keniscayaan. Kepemimpinan nasional yang berkualitas ini membutuhkan model kepemimpinan tingkat tinggi (*high leadership*). *High leadership* merupakan antitesis dari *low leadership*. Ia akan menjadi obor bangsa dalam menyongsong babakan baru yang lebih cerah. Secara normatif, model kepemimpinan nasional yang dibutuhkan bangsa ini minimal mengandung empat hal, dan yang pertama adalah visioner. Visioner berarti memiliki visi

Betapa indahnya jika memberi kesempatan menambah ilmu kepada aktivis mahasiswa, sesudah mereka menjadi pemimpin di kampus masing-masing. Seleksi kepemimpinan di kampus harus terus dimatangkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan program itulah akan lahir sosok Soekarno muda, Hatta muda, Syahrir muda, Supomo muda, dan banyak lagi kader pemimpin bangsa yang tumbuh dan mengakar ke bawah. Merekalah sosok-sosok pemimpin yang berjiwa kenegaraan dan mempunyai kemampuan intelektual yang meyakinkan. Dengan begitu, nantinya yang muncul bukan hanya pemimpin karbitan dan bukan pula kader jenggot seperti sekarang ini. Jika dibina secara terjenjang, mantan pemimpin-pemimpin kampus itu kelak akan menjadi pemimpin masyarakat sipil yang kuat. Sebab, sejak awal mereka telah terseleksi di kampus secara demokrasi dan rasional. Oleh karena itu, sudah saatnya secara terarah masyarakat Indonesia mulai menilai dan menyeleksi dari pemimpin tingkat daerah masing-masing, siapa saja yang dapat maju terus ke tingkat nasional. Kompetisi demokratisasi di dalam lingkup kecil akan mematangkan diri seorang

pemimpin ketika berkiprah dalam dunia yang luas. Dalam usaha mencari pemimpin yang berkualitas, negara-negara tetangga, seperti Singapura, memberikan dukungan nyata pada sumber daya manusia yang baik dan berbakat dengan mengalokasikan anggaran negara dan pembinaan yang serius. Sejak dua dekade lalu, mereka lakukan hal itu dengan membina kader, termasuk didalamnya memberi gaji yang pantas dalam jabatan pemerintah. Hal itu juga sebagai upaya agar tidak terjadi *brain drain* dan korupsi dalam birokrasi pemerintah.

Dibutuhkan kepemimpinan nasional kolektif yang komitmennya kuat untuk terus mendorong roda reformasi. Kepemimpinan yang tidak lekang karena panas atau lapuk karena hujan, jadi betul-betul konsisten. Ini bukan masalah undang-undang, keputusan Presiden, instruksi presiden atau peraturan daerah, tetapi menyangkut masalah mendasar, yaitu sikap mental. Perbaikan itu harus dimulai dari pucuk piramida. Kalau pimpinan nasional memberikan contoh yang konsisten, maka bagian-bagian piramida yang dibawah akan mengikuti. Akan tetapi, kalau yang berada di pucuk piramida masih gamang dan komitmennya kurang jelas untuk merekonstruksi mental yang sempat rusak sekian puluh tahun yang lalu, jelas jalan reformasi akan seperti sekarang.

Sudah saatnya "*equal opportunity*" harus dibuka selebar-lebarnya untuk menjaring kader-kader yang berkualitas dalam menghadapi era globalisasi dan kompetisi ini. Dengan begitu sosok pemimpin Indonesia ke depan benar-benar seorang pemimpin yang mengakar ke bawah, berpengalaman, mempunyai visi ke depan, sanggup mengentaskan bangsa dari krisis, dan mampu meninggikan harkat dan marabat Indonesia tercinta

Sekali lagi, keteladanan harus dimulai dari atas. Masyarakat Indonesia masih

feodalistis. Pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, masih sangat relevan. Pemimpin di tiap-tiap eselon harus menjadi kaca benggala. Kalau yang diatas tidak merasa risih dan tidak punya rasa malu korupsi, yang dibawah persis sama akan menirukan dengan cara yang lebih kreatif. ●

Daftar Pustaka

- Anonimus, *Reformasi Tanpa Cetak Biru*, 25 Mei 2003, Jakarta:Kompas.
- Hadimulyo, 1997, "Menatap Masa Depan" Percikan Pemikiran Politisi Muda, Jakarta: Pusat Peran Serta Masyarakat.
- Neta S Pane, 2001., *Mungkinkah Islah dengan Koruptor Orde Baru*, Kamis, 1 November, Jakarta:Kompas.
- Rahardjo Dawam. M., 1999 ; *Orde Baru dan Orde Transisi*. Yogyakarta:Ull Press.
- Rahardjo Dawam.M., 1999; *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*. Yogyakarta Ull Press .
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Wacana Dinamika Politik Bangsa*, 22 November 1990, Jakarta:Kompas.
- Saldi, Isra, *Saatnya Membentuk Komisi Konstitusi*, 5 Januari 2001, Jakarta: Kompas.
- Sutanto, Limas, . *Mengingat Tragedi Mei*, Sabtu 10 Mei 2003, Jakarta:Kompas.
- Taher, Tarmizi, *Menyoal Kepemimpinan Indonesia*, Sabtu, 5 Juli, Jakarta: Kompas.
- Tanri, Abeng, *Kepemimpinan Nasional Berbasis Sistem Kebutuhan Indonesia*, 11 Maret 2004, Jakarta:Kompas.



lebih parah lagi, banyak diantara mereka yang duduk di kursi pemimpin, tetapi bukan manusia yang punya kemampuan memimpin dan tidak mempunyai kemampuan manajerial sama sekali.

Orang yang paling ideal menjadi pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan sekaligus. Prof Zaleznik dari Universitas Harvard mengatakan, meskipun kondisi ideal itu tidak mudah ditemukan, realitasnya senantiasa ada. Senada dengan yang di atas, para ahli psikologi kepemimpinan menegaskan, sekarang banyak organisasi yang *over managed* (diatur secara berlebihan), tetapi *underlead* (kurang dipimpin). Padahal, hari ini dan esok kita berada dalam era penuh ketidakpastian, turbulensi, dan kebingungan, karena itu, kita butuh seorang pemimpin dan berkepemimpinan. Jadi tidak cukup seorang "Manajer" saja.¹²

Dalam keadaan multikrisis yang dialami bangsa Indonesia seperti saat ini, secara umum sangat dibutuhkan tiga fungsi utama pemimpin atau kepemimpinan. Pertama, visi yang jelas dengan arah yang menatap jauh ke depan. Dengan begitu, pemimpin dapat mengkomunikasikan program dan kebijakannya kepada rakyat untuk bergerak ke masa depan yang lebih progresif. Kedua, kemampuan *aligning people* (menyatukan rakyat). Maksudnya adalah kemampuan mengikat orang-orang untuk bersatu, berjajar, serta sejajar maju bersama untuk bergerak menuju ke arah perwujudan visi yang telah digariskan. Ketiga, *inspiring and motivating*. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi "hati dan pikiran" pengikut dan semua rakyatnya. Jika seorang manajer hanya punya "pengaruh secara tidak langsung", maka seorang pemimpin harus punya "pengaruh langsung" kepada bawahan, pengikut, serta semua rakyat.¹³

Trifungsi utama pemimpin atau kepemimpinan diatas dapat kita bedakan dengan tiga fungsi utama manajer, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian dan pelaksanaan, serta pengawasan. Oleh karena itu, untuk mengentaskan bangsa Indonesia dari krisis dan mengangkat harkat bangsa Indonesia menuju masa yang mencerdaskan, kombinasi kompetensi kepemimpinan dan manajerial adalah sebuah hal yang ideal. Jika tidak memungkinkan, hendaknya paling tidak mempunyai jiwa dan fungsi kepemimpinan sebagaimana diuraikan dimuka.

Jika ditelusuri kembali sejarah bangsa Indonesia, akan tampak bahwa sumber utama munculnya pemimpin bangsa ini adalah kampus, organisasi keagamaan, dan bisnis. Sejak fajar abad kedua puluh (1908), dunia kampus telah melahirkan pemimpin untuk kebangkitan nasional. Pada masa penjajahan, "kampus" menampilkan wujudnya dalam AMS (SMA), HBS dan MULO (SLTP). Pada tempat itulah para kiai, ustad, guru, dan tokoh nasional menggodok jiwa-jiwa budak untuk bangkit melawan penjajah menuju kemerdekaan bangsa. Dengan tempaan para tokoh itu, visi, inspirasi, serta motivasi kepemimpinan dapat menghunjam pada dada para pemuda dengan mantap.

Jenderal Clausewitz, ahli strategi besar yang amat terkenal dari Jerman, mengatakan bahwa perang tidak melahirkan seorang jenius besar, tetapi melahirkan seorang pemimpin besar. Pengalaman kepemimpinan yang ditempa dalam waktu lama tentu akan membawa seseorang menjadi makin matang sebagai pemimpin. Pengalaman yang berat seperti keadaan

¹² Tarmizi Taher, *Menyoal Kepemimpinan Indonesia*, Kompas, Sabtu, 5 Juli 2003..

¹³ Ibid

perang tentu lebih banyak melahirkan sosok pemimpin jika pengkaderan kepemimpinan dikelola dengan baik. Dalam keadaan normal (bukan perang), seharusnya pengkaderan kepemimpinan hendaknya lebih diperhatikan secara serius dan profesional. Berdasarkan realitas diatas, sejarah bangsa Indonesia sampai hari ini, menunjukkan bahwa kampus adalah sumber utama pemimpin atau kepemimpinan. Sayangnya, pemerintah sering tidak bersahabat dengan kampus sehingga pengkaderan kepemimpinan bangsa tidak terprogram dengan baik. Pengalaman besar dari para aktivis kampus lebih banyak ditonjolkan sisi negatifnya. Begitu juga dengan larangan mahasiswa untuk berkiprah dan berkeaktivitas melalui kebijakan NKK/BKK yang cenderung mengebiri munculnya kader pemimpin baru.¹⁴

Pemilu dan Kepemimpinan Nasional

Salah satu celah dalam Pemilu 2004 yang memberi optimisme bagi kelompok pro-perubahan adalah adanya pemilihan presiden dan wakil presiden langsung. Model pemilihan langsung ini memungkinkan lahirnya sosok pemimpin nasional yang benar-benar memiliki legitimasi dan dukungan kuat dari rakyat. Presiden dan wakil presiden sering diidentifikasi sebagai personifikasi kepemimpinan nasional meski kadang ini terlalu mensimplifikasi persoalan. Karena sebenarnya apa yang disebut kepemimpinan nasional, kompleksitasnya lebih dari sekedar presiden dan wakil presiden. Problem kepemimpinan nasional (*national leadership*) oleh banyak kalangan dianggap sebagai salah satu persoalan mendasar yang dihadapi bangsa. Masalah kepemimpinan ini merupakan satu pangkal dari sekian akar krisis yang mendera bangsa ini

selama hampir enam tahun. Kepemimpinan nasional kini dianggap kepemimpinan yang tidak memimpin. Inilah model kepemimpinan yang memiliki derajat rendah (*low leadership*).

Dikatakan tidak memimpin karena kepemimpinan yang ada tidak memenuhi tiga hal mendasar yang harus melekat dalam kepemimpinan. Pertama visi dan strateginya untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan guna mewujudkan visi itu. Visi merupakan konseptualisasi tentang hasil yang ingin diwujudkan seorang pencipta. Kedua, berkait dengan kegiatan kepemimpinan. Kegiatan kepemimpinan adalah merapatkan barisan, yang berarti mengkomunikasikan arah baru kepada mereka yang dapat menciptakan jemaah yang memahami visi dan memiliki komitmen untuk mewujudkannya. Tidak mungkin membangun sebuah koalisi besar untuk mengikuti visi seorang pemimpin bila sang pemimpin tak mampu mengomunikasikan apa yang mereka hendak wujudkan itu. Dengan cara demikian sikap diam, menunggu, nir-inisiatif hanya akan memampetkan transformasi visi ini.

Ketiga, untuk mewujudkan visi, seorang pemimpin dituntut senantiasa memberi motivasi dan inspirasi. Pemberian motivasi dan inspirasi ini dilakukan dengan menjaga agar orang bergerak dalam arah yang benar merujuk kebutuhan, nilai, dan emosi dasar. Karena itu, seorang pemimpin harus terus meniupkan optimisme pada rakyatnya meski jalan yang akan ditempuh terjal dan menjulang. Sehingga selip ucap seperti "bingung", "pusing", "takut melanggar HAM jika memberantas korupsi", "pemerintahan keranjang sampah" tidak perlu keluar dari pernyataan seorang pemimpin.

¹⁴ Ibid

Karena kepemimpinan nasional menjadi jantung utama perubahan bangsa, maka upaya mewujudkan kepemimpinan nasional yang berkualitas menjadi keniscayaan. Kepemimpinan nasional yang berkualitas ini membutuhkan model kepemimpinan tingkat tinggi (*high leadership*). *High leadership* merupakan antitesis dari *low leadership*. Ia akan menjadi obor bangsa dalam menyongsong babakan baru yang lebih cerah. Secara normatif, model kepemimpinan nasional yang dibutuhkan bangsa ini minimal mengandung empat hal, dan yang pertama adalah visioner. Visioner berarti memiliki visi

Betapa indahnya jika memberi kesempatan menambah ilmu kepada aktivis mahasiswa, sesudah mereka menjadi pemimpin di kampus masing-masing. Seleksi kepemimpinan di kampus harus terus dimatangkan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan program itulah akan lahir sosok Soekarno muda, Hatta muda, Syahrir muda, Supomo muda, dan banyak lagi kader pemimpin bangsa yang tumbuh dan mengakar ke bawah. Merekalah sosok-sosok pemimpin yang berjiwa kenegaraan dan mempunyai kemampuan intelektual yang meyakinkan. Dengan begitu, nantinya yang muncul bukan hanya pemimpin karbitan dan bukan pula kader jenggot seperti sekarang ini. Jika dibina secara terjenjang, mantan pemimpin-pemimpin kampus itu kelak akan menjadi pemimpin masyarakat sipil yang kuat. Sebab, sejak awal mereka telah terseleksi di kampus secara demokrasi dan rasional. Oleh karena itu, sudah saatnya secara terarah masyarakat Indonesia mulai menilai dan menyeleksi dari pemimpin tingkat daerah masing-masing, siapa saja yang dapat maju terus ke tingkat nasional. Kompetisi demokratisasi di dalam lingkup kecil akan mematangkan diri seorang

pemimpin ketika berkiprah dalam dunia yang luas. Dalam usaha mencari pemimpin yang berkualitas, negara-negara tetangga, seperti Singapura, memberikan dukungan nyata pada sumber daya manusia yang baik dan berbakat dengan mengalokasikan anggaran negara dan pembinaan yang serius. Sejak dua dekade lalu, mereka lakukan hal itu dengan membina kader, termasuk didalamnya memberi gaji yang pantas dalam jabatan pemerintah. Hal itu juga sebagai upaya agar tidak terjadi *brain drain* dan korupsi dalam birokrasi pemerintah.

Dibutuhkan kepemimpinan nasional kolektif yang komitmennya kuat untuk terus mendorong roda reformasi. Kepemimpinan yang tidak lekang karena panas atau lapuk karena hujan, jadi betul-betul konsisten. Ini bukan masalah undang-undang, keputusan Presiden, instruksi presiden atau peraturan daerah, tetapi menyangkut masalah mendasar, yaitu sikap mental. Perbaikan itu harus dimulai dari pucuk piramida. Kalau pimpinan nasional memberikan contoh yang konsisten, maka bagian-bagian piramida yang dibawah akan mengikuti. Akan tetapi, kalau yang berada di pucuk piramida masih gamang dan komitmennya kurang jelas untuk merekonstruksi mental yang sempat rusak sekian puluh tahun yang lalu, jelas jalan reformasi akan seperti sekarang.

Sudah saatnya "*equal opportunity*" harus dibuka selebar-lebarnya untuk menjaring kader-kader yang berkualitas dalam menghadapi era globalisasi dan kompetisi ini. Dengan begitu sosok pemimpin Indonesia ke depan benar-benar seorang pemimpin yang mengakar ke bawah, berpengalaman, mempunyai visi ke depan, sanggup mengentaskan bangsa dari krisis, dan mampu meninggikan harkat dan marabat Indonesia tercinta

Sekali lagi, keteladanan harus dimulai dari atas. Masyarakat Indonesia masih

feodalistis. Pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari, masih sangat relevan. Pemimpin di tiap-tiap eselon harus menjadi kaca benggala. Kalau yang diatas tidak merasa risih dan tidak punya rasa malu korupsi, yang dibawah persis sama akan menirukan dengan cara yang lebih kreatif. ●

Daftar Pustaka

- Anonimus, *Reformasi Tanpa Cetak Biru*, 25 Mei 2003, Jakarta:Kompas.
- Hadimulyo, 1997, "Menatap Masa Depan" Percikan Pemikiran Politisi Muda, Jakarta:Pusat Peran Serta Masyarakat.
- Neta S Pane, 2001., *Mungkinkah Islah dengan Koruptor Orde-Baru*, Kamis, 1 November, Jakarta:Kompas.
- Rahardjo Dawam. M., 1999 ; *Orde Baru dan Orde Transisi*. Yogyakarta:Ull Press.
- Rahardjo Dawam.M., 1999; *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*.Yogyakarta Ull Press .
- Sayidiman Suryohadiprojo, *Wacana Dinamika Politik Bangsa*, 22 November 1990, Jakarta:Kompas.
- Saldi, Isra, *Saatnya Membentuk Komisi Konstitusi*, 5 Januari 2001, Jakarta: Kompas.
- Sutanto, Limas, . *Mengingat Tragedi Mei*, Sabtu 10 Mei 2003, Jakarta:Kompas.
- Taher, Tarmizi, *Menyoal Kepemimpinan Indonesia*, Sabtu, 5 Juli, Jakarta: Kompas.
- Tanri, Abeng, *Kepemimpinan Nasional Berbasis Sistem Kebutuhan Indonesia*, 11 Maret 2004, Jakarta:Kompas.

